

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 1980



(PIDATO DAN LAMPIRAN)

DEPARTEMEN PENERANGAN RI
1980



*Presiden Republik Indonesia
Soeharto*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati;

Para hadirin yang berbahagia;

Besok pagi, Insya Allah, kita akan memperingati hari yang paling bersejarah bagi Bangsa Indonesia, ialah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus '45. Karena itu marilah kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati perjuangan dan segala pengorbanan bangsa ini Sehingga Bangsa Indonesia memperoleh kembali kemerdekaan dan kedaulatannya.

Peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan kita kali ini diliputi oleh suasana khusus, yaitu masih dalam suasana Lebaran. Karena itu dari mimbar ini saya menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri kepada segenap kaum muslimin Indonesia, disertai

permintaan maaf lahir batin atas segala kekhilafan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahi kita dengan keberkatan untuk masa depan kita masing-masing dan masa depan yang indah bagi seluruh bangsa kita.

Jika 35 tahun yang lalu, kita menyatakan dan mengumandangkan ke seluruh pelosok Tanah Air dan ke seluruh dunia bahwa Indonesia telah merdeka, maka masa depan yang indah itu lah yang kita angan-angankan. Dan kita sadar bahwa kita harus berjuang dan bekerja keras untuk menyaksikan keindahan masa depan itu. Sungguh tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan dan kerja keras. Kita ingin hidup bahagia di masa datang karena itu kita harus berjuang dan rela bekerja keras di masa sekarang.

Itulah tekad yang hams terus kita perbaharui setiap kali kita merayakan ulang tahun Kemerdekaan.

Dalam suasana peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan seperti sekarang ini kita terkenang kepada perjuangan mereka yang telah mendahului kita, kepada semua mereka yang telah mempersembahkan pengorbanan kepada bangsanya, sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka dan tetap tegak sampai sekarang ini. Kita berterima kasih kepada mereka, karena perjuangan dan pengorbanannya telah membuat kita menjadi bangsa yang terhormat.

Kita juga berterima kasih kepada pendiri-pendiri Republik ini, karena dengan kearifan dan kebijaksanaannya telah berhasil meletakkan dasar negara yang kuat, ialah Pancasila dan menetapkan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

Kita adalah bangsa yang tahu berterima kasih. Kita adalah bangsa yang menghormati mereka yang telah memberikan jasa dan pengorbanan kepada lahir dan tegaknya Kemerdekaan. Kita adalah bangsa yang juga memiliki kesadaran dan kebanggaan akan sejarah kita sendiri yang penuh dengan perjuangan. Kita ingin memelihara kesinambungan sejarah kita masa lampau, masa sekarang dan masa datang.

Karena rasa terima kasih dan kesadaran itulah kita mem-

bangun Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang Insya Allah akan saya resmikan malam nanti di tempat Proklamasi Kemerdekaan itu diucapkan 35 tahun yang lalu.

Tidak akan cukup kata-kata yang dapat kita kumpulkan, juga tidak ada ungkapan yang paling kena, untuk menyatakan kesyukuran kita yang sedalam-dalamnya atas nikmat kemerdekaan.

Karena itu, rasa syukur yang paling tepat adalah dengan jalan mempertahankan kemurnian cita-cita kemerdekaan dan dengan bekerja keras membangun bangsa ini sebagai pengisian kemerdekaan.

Kita menyadari bahwa Proklamasi Kemerdekaan bukan sekedar pernyataan bahwa bangsa kita telah melepaskan belenggu penjajahan; kembali hidup tegak sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan terhormat. Proklamasi Kemerdekaan berarti juga perjuangan yang penuh tantangan.

Proklamasi Kemerdekaan adalah perjuangan yang mengandung harapan-harapan! Harapan untuk memiliki masa depan yang baik, harapan untuk menikmati kehidupan sesuai dengan martabat dan harkat bangsa yang merdeka, harapan untuk mengembangkan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai budayanya sendiri, harapan untuk menjadi tuan di negeri sendiri, yang kesemuanya hanya akan terwujud dengan perjuangan dan kerja keras.

Proklamasi Kemerdekaan adalah juga tanggungjawab! Tanggungjawab untuk membangun Tanah Air oleh bangsa sendiri, dengan kemampuan sendiri, dan untuk kepentingan bangsa sendiri. Juga tanggungjawab untuk mengerahkan dan mengarahkan segenap potensi dan sumber daya bangsa kita untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Juga tanggungjawab untuk mengatur dan memajukan dirinya sendiri.

Selama Orde Baru ini kita telah mulai melaksanakan tanggungjawab itu dengan melaksanakan pembangunan! Pembangunan untuk melaksanakan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional

seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, ialah melindungi segenap penduduk dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa serta turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selama 35 tahun merdeka, sebenarnya baru 10 tahun terakhir ini kita melaksanakan pembangunan yang sesungguhnya, khususnya pembangunan untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan umum. Dengan kata lain, 25 tahun sebelumnya kita memang belum berkesempatan atau lalai menangani masalah pembangunan ekonomi itu.

Karena itu, pada saat-saat kita memperingati ulang tahun Kemerdekaan, marilah kita renungkan kembali semua pengalaman kita: keberhasilan dan kegagalannya, kegembiraan dan kepedihannya. Dan marilah kita sadari kekuatan kita. Sama pentingnya juga kita akui kelemahan kita. Untuk kemudian : kekuatannya kita pupuk, dan kelemahannya kita buang.

Dengan semangat ini kita akan memandang masa depan dengan penuh kepercayaan. Kita percaya kepada masa depan itu karena selama ini kita memang mencapai banyak hasil, dan kita mempunyai kekuatan untuk mengatasi kesulitan.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Dalam kurun waktu sejarah, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita kali ini mempunyai arti yang khusus.

Pertama, karena pada 17 Agustus tahun ini bangsa kita genap berusia 35 tahun. Tiga setengah dasawarsa Indonesia Merdeka membuat kita bertambah kaya dengan pengalaman dan membuat bangsa kita makin dewasa. Kita banyak mengalami pasang naik, tetapi kita juga kadang kala mengalami pasang surut. Kita banyak menikmati keberhasilan-keberhasilan yang menggembirakan, tetapi kita juga sering diuji oleh cobaan-cobaan yang memprihatinkan.

Kita banyak mencapai kemajuan-kemajuan namun kita juga masih dikelilingi oleh kesulitan-kesulitan.

Tetapi juga jelas bahwa di masa lampau itu kita telah mengambil berbagai keputusan sejarah yang tepat, kita mempunyai kekuatan-kekuatan sehingga kita tetap berdiri tegak sampai sekarang dan kita juga mencapai kemajuan-kemajuan hingga kita sampai pada keadaan seperti sekarang.

Kedua, kita mulai memasuki dasawarsa 80-an. Dasawarsa ini akan menguji bangsa Indonesia: apakah kita dapat berhasil mengemban tugas-tugas besar pembangunannya. Dasawarsa ini akan menguji dunia: apakah umat dapat selamat melampaui berbagai krisis, kemelut dan tantangan besar yang menghadang.

Karena itu marilah kita renungi kembali sejarah 35 tahun di belakang kita itu, untuk bekal menyongsong tugas-tugas nasional dan internasional kita memasuki dasawarsa 80-an ini.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Lima tahun pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan kita bergulat dalam perjuangan bersenjata melawan penjajah untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan yang baru kita rebut. Kita berada dalam kancah revolusi perombakan besar-besaran dari alam penjajahan ke dalam alam merdeka. Dalam masa yang sulit ini kita juga ditusuk dari belakang oleh pemberontakan kaum komunis yang pertama, yang mereka mulai dari Madiun, di tahun '48, yang untunghlah dapat segera kita tumpas.

Dalam tingkat perjuangan yang demikian, tentu saja pembangunan ekonomi tidak banyak diharapkan, walaupun waktu itu telah ada rencana ekonomi perjuangan.

Dalam kurun waktu itu segala kekuatan dan kemampuan bangsa yang ada kita kerahkan untuk menegakkan kemerdekaan nasional bahkan kalau perlu juga dengan darah dan jiwa bangsa kita sendiri. Perjuangan itu lah yang membuat kita menjadi bangsa

yang merdeka dengan kekuatan sendiri tanpa campur tangan luar, yang membuat kita memiliki harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri.

Menjelang masuk ke dalam dasawarsa 50-an perjuangan kemerdekaan kita memberi buah yang nyata, ialah pengakuan internasional atas kedaulatan kita, berkat kekokohan persatuan dan kesatuan seluruh bangsa kita Berta semangat perjuangan yang dilandasi oleh semangat '45, meskipun dalam bentuk (sementara) Republik Indonesia Serikat sebagai hasil Konferensi Meja Bundar.

Setelah Republik Indonesia Serikat dapat kita hapuskan dalam waktu singkat untuk kembali ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, saat itu sesungguhnya merupakan saat yang baik untuk memulai pembangunan demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Namun sejarah kita berjalan ke arah yang lain, kita terjebak dalam kehidupan liberal di lapangan politik maupun ekonomi. Walaupun Pancasila tetap tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara (1950), namun kita berdiri di atas kerangka Undang-Undang Dasar yang berlainan dengan semangat dan keinginan Undang-Undang Dasar '45. Zaman merajalelanya liberalisme ini ditandai dengan bermunculannya puluhan partai-partai politik. Zaman itu diperburuk oleh jatuh banggunya Kabinet. Keadaan ini membuat tidak satu Kabinet pun yang mampu melaksanakan programnya, karena is telah jatuh sebelum cukup waktu untuk melaksanakan programnya. Zaman liberal menaburkan lagi benih-benih kedaerahan, kesukuan, golongan dan lain-lain faham sempit yang sebenarnya telah ditempa dalam persatuan dalam zaman perjuangan kemerdekaan. Waktu itu mulai juga berkembang pikiran-pikiran baru untuk merombak dasar negara Pancasila. Pemberontakan bersenjata bermunculan, yang hampir semuanya merupakan kelanjutan dari pergolakan politik yang tidak terselesaikan. Pergolakan politik mencapai puncak kegawatannya pada macetnya Sidang Konstituante, karena ada pihak-pihak yang menginginkan dasar negara yang lain dari Panca-

sila yang telah kita sepakati di tahun '45.

Menjelang dasawarsa 60-an, kegawatan ini diatasi dengan Dekrit Presiden yang mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar '45. Harapan-harapan baru muncul kembali. Dalam kurun waktu ini sejarah bangsa kita mencatat kembalinya Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini berarti utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cita-citakan. Namun zaman ini lambat laun ditandai dengan penyimpangan-penyimpangan yang mendasar dilapangan ideologi, politik dan ekonomi dari apa yang dicita-citakan oleh Proklamasi Kemerdekaan. Pancasila diartikan sebagai "nasakom", dengan segala akibatnya. Rakyat terpecah dalam golongan-golongan dengan ideologinya sendiri yang sempit. Ditambah lagi dengan "jor-joran manipolis" yang membuat golongan yang satu berhadap-hadapan dengan golongan yang lain. Keadaan seperti itu sulit dibayangkan adanya persatuan nasional yang rukun dan tutus. Sementara itu keadaan ekonomi kita terus merosot, laju inflasi terus membubung tinggi, produksi tidak dapat berjalan lancar, cadangan devisa kosong dan seterusnya.

Proses kehidupan bangsa yang merosot itu sejalan dengan usaha PKI untuk mematangkan situasi, sebagai persiapan pemberontakannya yang kedua, yang meletus menjelang akhir tahun '65. Tujuan akhir pemberontakan itu sangat jelas ialah untuk mendirikan kekuasaan komunis di bumi Indonesia, dan meniadakan Pancasila.

Kembali bangsa kita mengalami ujian sejarah yang berat. Dan kembali pula bangsa kita dapat tetap tegak dengan berpegang teguh kepada Pancasila.

Kita selalu memanjatkan segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dapat mengatasi semua pergolakan yang menjadi bagian dari pertumbuhan bangsa kita.

Kita bertekad agar pukulan demi pukulan tidak terus mendera bangsa kita, agar kita tidak terus menerus menelan kepahitan hidup. Pergolakan, perpecahan dan ketegangan di bidang politik

serta kemunduran ekonomi yang berlangsung terus selama dua puluh tahun benar-benar tidak pernah memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

Dui 35 tahun sejarah Kemerdekaan telah memberi 3 pengalaman penting bagi bangsa Indonesia.

- pertama : setiap kali bangsa kita menghadapi ujian berat maka keselamatan dan persatuan kita hanyalah ditentukan oleh kesetiaan kita kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45;
- kedua : untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan yang kita cita-citakan, maka satu-satunya jalan yang harus kita tempuh adalah dengan melaksanakan pembangunan;
- ketiga : untuk melaksanakan pembangunan itu kita semua harus dapat memelihara stabilitas nasional yang dinamis.

Perlunya stabilitas nasional ini hendaknya benar-benar kita sadari sedalam-dalamnya. Sekali lagi, pengalaman selama sejarah Indonesia merdeka menunjukkan bahwa tanpa stabilitas maka pembangunan tidak mungkin berjalan. Tanpa pembangunan, kesejahteraan rakyat tidak akan menjadi kenyataan. Dan jika kesejahteraan rakyat ini tidak terwujud, maka kemerdekaan yang kita miliki ini tidak lebih dari kehormatan tanpa arti.

Sangat jelas bahwa stabilitas yang kita perlukan bukanlah stabilitas yang membungkam suara rakyat. Ini akan membuat kehidupan ini mencekam dan menakutkan. Sebaliknya kita juga tidak menginginkan hanya suara hiruk pikuk tanpa tujuan. Ini hanya akan melelahkan dan mendatangkan kekacauan.

Yang kita inginkan adalah stabilitas yang dinamis, di mana suara rakyat yang berdaulat dan jujur tersalur secara tertib menurut cara-cara yang disediakan dan ditunjukkan oleh Undang-

Undang Dasar '45.

Belajar dari pengalaman masa lampau, dan bertanggung jawab atas pengisian kemerdekaan, maka di tahun 1966 kita mencapai kesepakatan nasional untuk membangun Orde Baru.

Orde Baru itu bertekad untuk membangun bangsa Indonesia di segala bidang; dan sekaligus menegakkan kehidupan bangsa yang tertib dan kokoh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45.

Demikianlah setelah kita mengadakan koreksi total secara konstitusional dan berhasil melaksanakan stabilisasi, maka menjelang permulaan dasawarsa 70-an kita mulai melaksanakan pembangunan.

Strategi dan arah, tujuan dan sasaran pembangunan di segala bidang itu ditetapkan sendiri secara konstitusional oleh rakyat melalui Sidang-sidang Umum MPR, terutama yang tertuang dalam GBHN. Strategi pembangunan itu pula yang menentukan. agar kita memusatkan perhatian pada pembangunan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan rakyat, tanpa mengabaikan pembangunan politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air ;

Banyak yang telah kita kerjakan dan banyak pula kemajuan yang telah kita capai dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang itu selama ini. Dan jangan kita lupakan, bahwa segala kemajuan tadi kita capai dengan susah payah, dengan segala kesungguhan dan kesanggupan kita. Mungkin saja kita belum puas dengan apa yang dapat kita capai hingga sekarang. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa selama ini kita tidak berbuat apa-apa.

Kita telah berusaha keras untuk membangun kehidupan politik dan kenegaraan yang sehat dengan menunjukkan penghormatan kita kepada demokrasi, kepatuhan kita kepada konstitusi

dan sikap tunduk kepada hukum.

Di bawah naungan Undang-Undang Dasar '45 kita telah dua kali mengadakan Pemilihan Umum, yang kemudian menghasilkan terbentuknya DPR dan MPR. Melalui Sidang Umum MPR itu pula telah kita tetapkan GBHN dan juga telah terpilih Presiden dan Wakil Presiden. Ini merupakan hasil kerja kita semua dalam usaha menegakkan sistem konstitusional.

Kita telah memiliki lembaga-lembaga kenegaraan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan konstitusional. Kita tidak sangsi akan peranan dan hasil-hasil karya lembaga-lembaga konstitusional kita: baik MPR, Pemerintah, DPR, DPA, BPK maupun Mahkamah Agung. Usaha-usaha kita ke arah ini akan terus kita tingkatkan sehingga kita dapat menciptakan keseimbangan yang lebih mantap dan serasi dalam pengambilan keputusan-keputusan di tingkat nasional.

Untuk menegakkan sistem konstitusional itu kita tidak hanya memerlukan Pemerintah yang kuat. Kita juga membutuhkan DPR yang berbobot, DPA yang bijaksana, BPK yang cermat dan Mahkamah Agung yang berwibawa.

Dengan tetap berpegang kepada tugas konstitusional masing-masing, kita perlu terus mengembangkan saling hubungan yang lebih mantap dan serasi antara lembaga-lembaga konstitusional kita. Ini lebih sesuai dengan asas kekeluargaan yang menjiwai pikiran-pikiran Undang-Undang Dasar '45. Hak-hak dan kewajiban konstitusional, baik yang nyata-nyata diberikan oleh Undang-Undang Dasar maupun kebiasaan yang kita kembangkan bersama dalam praktek penyelenggaraan negara, harus kita gunakan dengan penuh tanggung jawab. Bobot dan wibawa lembaga-lembaga konstitusional harus kita jaga agar kita jangan terpelanting dalam kekacauan-kekacauan liberalisme atau terjerumus dalam kekejaman totaliterisme.

Kita juga harus berhati-hati dan waspada dalam memberi isi ke dalam praktek kehidupan politik dan ketatanegaraan kita.

Kita perlu waspada dan menyaring pikiran-pikiran dan cara-cara demokrasi yang datang dari luar. Demokrasi kita hanya dapat subur jika kita tumbuhkan di atas dasar Pancasila.

Memang, pembangunan politik, pembangunan demokrasi dan pembangunan kehidupan konstitusional tidak dapat sekali jadi. Pembangunan politik merupakan bagian yang sangat sulit dari keseluruhan pembangunan bangsa! Karena itu ia meminta ketabahan dan kesabaran kita semua.

Kita perlu menyadari bahwa kita belum memiliki tradisi yang mantap dalam memberi isi dan menentukan bentuk dari semua aspek penting daripada pelaksanaan kehidupan politik. Kita masih terus mencoba mencari keseimbangan yang tepat antara kebebasan dan tanggungjawab, antara kepentingan perorangan dan golongan di satu pihak dan kepentingan umum, kepentingan nasional di pihak lain. Kita juga sedang berusaha agar identitas kelompok tidak merusak nilai-nilai dasar yang menjadi kekuatan utama bangsa kita. Kita juga sedang terus mencari cara-cara melancarkan perubahan yang tidak memutuskan kesinambungan. Dan kesemuanya itu harus tetap dilandasi oleh dasar falsafah Pancasila, yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tetap menjaga keutuhan bangsa dan diliputi suasana kekeluargaan. Itulah persoalan-persoalan dasar yang kita hadapi.

Tanggung jawab kita sedang diuji apakah kita akan dapat memberi jawab yang paling tepat terhadap persoalan-persoalan dasar tadi, sehingga kita selamat sampai pada tujuan bersama.

Untuk itulah kita secara berhati-hati dan bertahap berusaha memberi isi yang makin berbobot dan bentuk yang makin mantap terhadap berbagai aspek kehidupan politik. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum misalnya diperlukan waktu yang panjang sebelum kita berhasil membuat Undang-undang Pemilihan Umum, padahal Pemilihan Umum itu sendiri telah menjadi kesepakatan nasional sejak tahun 1966. Demikian pula kita telah memperbaiki Undang-undang Pemilihan Umum agar kita dapat melaksanakan

Pemilihan Umum tahun '77 lebih baik dari Pemilihan Umum tahun '71. Demikian pula Pemilihan Umum- yang akan datang kita usahakan agar lebih mantap lagi dari Pemilihan Umum yang lalu. Dan untuk itu diperlukan waktu yang cukup panjang serta pembahasan yang cukup seru di DPR, untuk dapat menyelesaikan Undang-undang Pemilihan Umum yang disempurnakan lagi. Kita semua mengharapkan agar dengan Undang-undang Pemilihan Umum yang telah disempurnakan itu, pelaksanaan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia, yang akan kita selenggarakan pada tahun 1982 akan dapat berjalan lebih baik lagi.

Hal ini saya kemukakan untuk menunjukkan bahwa untuk melaksanakan pembinaan kehidupan politik yang benar-benar mantap serta memuaskan sungguh diperlukan proses yang terus menerus dan waktu yang cukup panjang.

Demikian pula susunan MPR, DPR dan DPRD juga kita dasarkan atas kesepakatan-kesepakatan nasional yang berpangkal pada tekad kita sejak mendirikan Orde Baru ini; ialah untuk menjamin tetap dipertahankannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 serta untuk menjamin kepastian jalannya pembangunan. Kesepakatan nasional inilah yang menghasilkan susunan MPR, DPR dan DPRD yang terdiri dari anggota-anggota yang sebagian besar dipilih dan anggota-anggota yang diangkat, yang terdiri dari karyawan ABRI dan Non ABRI. Kesepakatan nasional ini secara konstitusional kita tuangkan dalam Undang-undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Kita juga telah berusaha agar kita semua memiliki disiplin nasional yang tinggi dan berusaha melaksanakan apa yang telah kita putuskan bersama sebaik-baiknya, karena secara konstitusional kita memang terikat dan wajib melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Rakyat sendiri.

Putusan Rakyat yang mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting adalah yang dituangkan dalam GBHN, yang merupakan pedoman dan arah bagi perjuangan negara dan rakyat

Indonesia dalam waktu lima tahun mendatang dan dalam jangka panjang. Dan kita telah berusaha agar setiap Sidang Umum MPR yang berlangsung sekali dalam lima tahun itu selalu dapat menghasilkan GBHN yang sangat penting itu. Dalam hubungan ini kita juga telah merintis kebiasaan dalam memberi isi dan bentuk kehidupan konstitusional itu, ialah pengajuan rancangan GBHN oleh Presiden/Mandataris untuk dibahas dan diputuskan oleh MPR.

Pengalaman menunjukkan bahwa menyusun GBHN bukanlah hal yang mudah, terutama agar dapat mencapai kesepakatan nasional. Dalam Sidang Umum tahun 1968 misalnya MPRS gagal menyusun GBHN. Padahal kegagalan menyusun GBHN berarti hambatan yang besar terhadap kelanjutan pembangunan. Karena itulah, sebagai persiapan untuk Sidang Umum MPR tahun 1973 dan Sidang Umum MPR tahun 1978, Presiden menyiapkan rancangan GBHN sebagai bahan untuk dibahas dalam dan diputuskan oleh Majelis, sebagai lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat yang mempunyai wewenang untuk membuat GBHN. Demikian juga dewasa ini Pemerintah sudah mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk persiapan penyusunan rancangan GBHN untuk disampaikan kepada MPR hasil Pemilihan Umum yang akan datang.

Dalam pembangunan sosial politik kita juga telah mengadakan pembaharuan kehidupan politik dan perombakan struktur politik. Langkah ini juga merupakan pelaksanaan dari kesepakatan nasional kita semua, yang tercermin dalam Ketetapan-ketetapan MPRS dan Ketetapan-ketetapan MPR berikutnya. Kita harus mengadakan pembaharuan dan perombakan karena kehidupan politik cara yang lama dan struktur politik yang lama telah gagal mengantarkan bangsa Indonesia kepada pembangunan yang akan membawanya ke arah kemajuan dan kesejahteraan.

Pembaharuan kehidupan politik itu harus kita lakukan, karena pengalaman sebelum tahun 1966 mengajarkan kepada kita, bahwa membiarkan rakyat terus menerus terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti zaman "jor-joran manipolis" telah membuat rakyat terkotak-kotak secara sempit dalam golongan masing-masing, dengan segala fanatisme yang sengit kepada golongannya sendiri. Malahan, membuat golongan-golongan saling berhadapan satu dengan yang lain. Suasana seperti ini, walaupun tampaknya penuh dinamika, namun telah menghabiskan tenaga dan mendorong timbulnya perpecahan dan keonaran. Di samping itu kegiatan-kegiatan politik praktis yang berlebih-lebihan telah membuat rakyat lengah dari tugas-tugas pembangunan, yang justru mutlak bagi peningkatan kemajuan dan kesejahteraan umum.

Pengalaman waktu itu menunjukkan bahwa masalah-masalah politik tidak diusahakan dipecahkan secara masuk akal dengan musyawarah-musyawarah dalam gedung-gedung perwakilan rakyat. Ia berubah menjadi pertarungan kekuatan di mana-mana : di sawah-sawah dan perkebunan antara kelompok-kelompok petani, di pabrik-pabrik atau perusahaan di antara kelompok-kelompok buruh, di kampus-kampus dan di sekolah-sekolah antara kelompok-kelompok mahasiswa dan pelajar, di lapangan pendidikan di antara kelompok-kelompok guru, di Departemen-departemen dan kantor-kantor di antara kelompok-kelompok pegawai. Malahan juga dicoba menyelipkan di kalangan ABRI : Angkatan dengan Angkatan, Kesatuan dengan Kesatuan.

Sekali lagi, pengalaman pahit masa lampau itu lah yang memberi pelajaran kepada kita dan melahirkan konsensus nasional untuk mengadakan pembaharuan kehidupan politik dan perombakan struktur politik. Dan konsensus nasional itu kemudian dapat kita jelmakan dalam bentuk Undang-undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Undang-undangnya itu pun baru

dapat diselesaikan setelah melampaui jangka waktu yang cukup panjang dan yang merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai dalam tingkat keadaan sampai sekarang.

Pelaksanaan dari Undang-undang ini pun masih terus memerlukan pemantapan agar dua partai politik dan golongan karya yang diakui dan diatur dalam Undang-undang itu benar-benar dapat menjadi modal dasar pembangunan bangsa seperti yang ditetapkan dalam GBHN, dapat mengantarkan bangsa Indonesia dan berpartisipasi positif dalam mencapai cita-cita kemerdekaan.

Dalam rangka pembaharuan kehidupan politik ini pula lah harus kita lihat peranan ABRI sebagai kekuatan sosial, terutama sebagai stabilisator dan dinamisator kehidupan politik dan pelaksanaan pembangunan.

ABRI adalah milik bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai kekuatan sosial ABRI duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya. Namun juga jelas bahwa ABRI adalah kekuatan nasional yang menjadi pendukung dan pembela ideologi negara Pancasila yang tidak mengenal menyerah. Karena itu tidak mungkin ABRI akan memojokkan –apalagi memusuhi– sesuatu golongan atau kekuatan politik dalam masyarakat kita. Yang benar adalah bahwa ABRI tidak mengenal menyerah dalam membela Pancasila. Dengan dwifungsinya ABRI akan berusaha mempertahankan dan melestarikan Pancasila, dengan jalan demokratis dan konstitusional. Dalam rangka ini ABRI akan bergandengan tangan dengan semua kekuatan bangsa kita yang tanpa ragu-ragu membela Pancasila dan bersama-sama membangun masyarakat Pancasila. Dan adalah juga menjadi panggilan pengabdian ABRI untuk mengajak, menyadarkan mereka yang masih ragu-ragu untuk menjadi tanpa ragu-ragu sedikitpun terhadap kebenaran Pancasila dan pengamalannya.

Sidang Dewan yang terhormat ;

Dalam bersama-sama membangun kehidupan politik yang sehat itu, kita juga berusaha memberi isi yang makin berbobot dan wujud yang lebih nyata dari kehidupan demokrasi kita yang berdasarkan Pancasila.

Dalam alam demokrasi, kita boleh saja berbeda pendapat mengenai sesuatu masalah atau banyak masalah. Kita tidak menganggap perbedaan pendapat sebagai suatu cela; juga bukan malapetaka. Melalui perbedaan pendapat kita akan mendapatkan jawaban yang terbaik mengenai masalah-masalah yang kita hadapi bersama. Perbedaan pendapat untuk mencari kebaikan adalah warna-warninya yang indah dari demokrasi, karenanya harus diberi kesempatan untuk tumbuh dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun hendaknya selalu diingat bahwa setiap perbedaan pendapat itu haruslah tetap dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran dan kesopanan, tidak malahan dibumbui dengan hal-hal yang menjurus pada fitnah, penghinaan atau adu domba. Perbedaan pendapat yang demikian itu jelas tidak membangun, tidak akan menemukan kebaikan yang kita inginkan bersama.

Sebaliknya kecerobohan penggunaan hak-hak demokrasi dengan melemparkan fitnah dan penghinaan terang merusak sopan santun politik, dan malahan dapat berhadapan dengan hukum, yang tanpa ragu-ragu harus kita tegakkan di negeri ini. Tanpa penjagaan yang pantas oleh hukum orang dapat berlindung di bawah payung demokrasi untuk menista orang lain atau kelompok lain. Jika ini dibiarkan berlarut-larut maka kekacauan politik dan kekasaran demokrasilah yang akan kita derita bersama.

Di negara kita yang demokratis ini perbedaan pendapat mempunyai tempat yang terhormat. Karena itu kita menghormati perbedaan pendapat. Pemerintah juga menghormatinya, malahan perbedaan pendapat dengan Pemerintah sekalipun. Pemerintah

pun membuka diri terhadap kritik, baik terhadap kebijaksanaan yang diambil maupun terhadap pelaksanaan yang memerlukan koreksi dari masyarakat. Pemerintah sendiri selalu meneliti dirinya sendiri untuk melaksanakan setiap perbaikan yang memang perlu. Sikap ini sesungguhnya telah kita hayati, yang dalam budaya kita terkenal sebagai "mawas diri".

Sebagai bangsa yang kaya dengan warisan sopan santun dan keluhuran budi, marilah kesopanan dan keluhuran itu kita jadikan nafasnya kehidupan politik kita. Dengan demikian kita dapat mengembangkan kehidupan politik yang berkebudayaan.

Apabila ada perbedaan pendapat dan kritik politik terhadap sesuatu, marilah kita suarkan dan kita salurkan melalui jalur dan wadah yang cukup disediakan oleh Undang-Undang Dasar. Dan tidak semena-mena melalui fitnahan dan hasutan untuk mengelembui masyarakat didorong oleh dasar "tujuan menghalalkan cara". Apabila hal ini yang dilakukan, pasti keonaran dan kekacauan yang akan ditimbulkan, karenanya harus dihindarkan.

Karena itu kita harus mengambil sikap tegas dalam menjaga agar setiap aturan permainan politik dan kenegaraan tetap berjalan di atas semangat dan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dan marilah makin kita mantapkan pelaksanaan sistem dan kelembagaan politik dan ketatanegaraan sesuai dengan semangat dan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Dalam pembangunan politik itu penting sekali pendidikan politik untuk rakyat, agar rakyat tahu bagaimana menggunakan hak-hak politiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan bagaimana menjalankan hak-hak politiknya dengan penuh kesadaran. Justru untuk mendewasakan kehidupan politik inilah maka seluruh masyarakat diharapkan dapat mengikuti penataran P4, Undang-Undang Dasar '45 dan GBHN. Dengan bimbingan BP7 diharapkan berbagai lapisan dan organisasi masyarakat dapat menyelenggarakan dan mengikuti penataran-

penataran tersebut, baik di Pusat maupun juga di Daerah-daerah. Saya harapkan juga prakarsa daerah-daerah untuk menggelorakan penataran-penataran P4, Undang-Undang Dasar '45 dan GBHN itu. Demikian pula kita juga perlu meningkatkan peranan dan partisipasi media massa untuk memasyarakatkan P4 itu sehingga makin cepatlah masyarakat luas dan setiap warga negara memahami dan menghayati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan jiwa Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar '45.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Sejalan dengan usaha kita untuk memantapkan stabilitas dan pembangunan politik tadi, kita terus melanjutkan pembangunan untuk memastikan terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan pembangunan itu seperti yang dikehendaki oleh GBHN selalu diusahakan untuk berpijak pada Trilogi Pembangunan, yaitu Pemerataan Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Nasional. Dalam rangka itulah maka pertumbuhan ekonomi adalah jaminan untuk memungkinkan pemerataan yang berisikan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam hubungan ini maka dapat dinyatakan bahwa secara nasional keadaan ekonomi kita sekarang ditandai oleh dua hal. Pertama, ia makin memiliki ketahanan yang dapat kita andalkan; dan kedua, ia telah memiliki kekuatan untuk pertumbuhan selanjutnya.

Kedua hal itulah yang harus kita tingkatkan di masa datang, agar kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial dapat makin terasa di mana-mana. Peningkatan itu sekaligus kita arahkan untuk mencapai sasaran utama pembangunan jangka panjang—yang ditunjukkan oleh GBHN—ialah terciptanya landasan yang

kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Makin kuatnya ketahanan ekonomi nasional kita itu antara lain ditandai oleh tetap terkendalinya stabilitas ekonomi nasional, di tengah-tengah gejolak ekonomi dunia yang terjadi selama tahun-tahun belakangan ini. Keadaan ekonomi dunia yang dewasa ini diliputi oleh ketidak pastian, yang disamping disebabkan oleh ketegangan-ketegangan dan pertikaian politik yang terjadi di berbagai kawasan dan di antara negara-negara besar, juga disebabkan oleh berbagai krisis ekonomi dunia yang menimbulkan inflasi dan resesi di negara-negara maju. Hal ini mau tidak mau akan mempunyai pengaruh kepada ekonomi negara berkembang, termasuk ekonomi Indonesia.

Namun kita bersyukur, karena kita telah memiliki daya tahan terhadap guncangan ekonomi dunia tadi. Kita dapat memperkuat ketahanan ekonomi itu, di samping sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan selama ini, juga karena kita berani mengambil langkah langkah pengamanan di tahun-tahun yang lalu. Dan terutama berkat kesediaan seluruh bangsa kita untuk dengan penuh pengertian mengeratkan ikat pinggang dan terus bekerja sejalan dengan kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah.

Dalam rangka mengamankan ekonomi nasional kita dalam jangka panjang, kita telah dengan penuh perhitungan berani mengadakan devaluasi yang terkenal dengan "Kebijaksanaan 15 November". Beberapa bulan yang lalu kita dengan berat telah mengadakan penyesuaian harga BBM, tarif angkutan dan listrik serta penyesuaian-penyesuaian lainnya.

Memang terdapat berbagai pendapat di antara kita mengenai langkah-langkah yang telah kita ambil di masa lampau, antara lain adanya kekhawatiran bahwa langkah-langkah itu akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan ekonomi yang dapat

mengganggu stabilitas nasional. Namun ternyata justru berkat langkah itu pula kita sekarang selamat melampaui ujian dan tantangan ekonomi, dan makin mampu memproduksi serta makin dapat bertahan.

Barang-barang produksi dalam negeri kita ternyata memiliki daya saing yang cukup mantap, sehingga mampu bersaing dengan barang-barang produksi luar negeri, baik di pasaran luar negeri, terlebih-lebih di pasaran dalam negeri. Dengan demikian ini, kita mencapai dua sasaran penting sekaligus, yaitu pertama : kegairahan produksi di berbagai bidang —pertanian, perindustrian dan pertambangan— yang dengan demikian juga membuka banyak lapangan kerja. Dan yang kedua memungkinkan pemupukan devisa yang makin besar, karena ekspor kita terus meningkat, sedangkan laju impor barang-barang jadi/konsumsi menurun. Karena itu keadaan cadangan devisa kita dewasa ini sangatlah membesarkan hati, apabila dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya dan terlebih jika dibandingkan dengan sebelum kita melaksanakan pembangunan. Hal ini akan merupakan modal penting untuk mempercepat peningkatan produksi dan investasi maupun dalam memantapkan stabilitas ekonomi.

Seperti telah saya singgung tadi, produksi kita di berbagai bidang mengalami kenaikan-kenaikan.

Dalam hubungan ini yang paling membesarkan hati adalah kenaikan produksi beras. Dalam tahun '80 ini diperkirakan kita akan dapat menghasilkan sekitar 20 juta ton beras, suatu kenaikan sekitar 2 juta ton apabila dibandingkan dengan panen tahun '79. Dengan kenaikan produksi yang membesarkan hati tadi, dewasa ini kita juga memiliki stok nasional yang cukup kuat, ialah sekitar 2,5 juta ton beras. Dari jumlah ini sekitar 1,5 juta ton beras merupakan pembelian dalam negeri dalam beberapa bulan ini, suatu jumlah yang belum pernah tercapai dalam sejarah pengadaan beras

dalam negeri. Dan angka ini diharapkan masih akan meningkat terus.

Sebagaimana kita semua mengetahui kita mutlak perlu memupuk stok pangan, khususnya beras, untuk mengatasi keadaan kelangkaan pangan pada waktu-waktu paceklik dan sewaktu-waktu diperlukan jika panen di suatu tempat tidak memenuhi harapan, jika timbul bencana alam dan lain-lain.

Dengan makin kuatnya stok beras, maka akan makin menjamin stabilitas harga beras di waktu yang akan datang dan ini juga akan memperkuat stabilitas dan ketahanan ekonomi kita. Pembelian beras di dalam negeri yang demikian besar yang dilakukan melalui BUUD/KUD langsung dari petani dengan harga dasar yang pasti juga berarti bahwa penghasilan petani terjamin dan bertambah baik. Pengadaan beras semacam ini akan terus dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin penghasilan petani yang pasti dan mendorong kegairahan produksi beras, meskipun kita harus mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh masalah pergudangan, penyimpanan dan sebagainya.

Produksi beras yang menggembirakan itu menunjukkan bahwa segala jerih payah kita selama ini benar-benar membuahkan hasil. Kita memang telah bekerja keras membangun bendungan dan irigasi, membangun pabrik-pabrik pupuk agar terjamin penyediaan pupuk yang diperlukan, menyediakan obat hama yang cukup, terus mencari dan menemukan bibit-bibit unggul, dan terus menerus memberi penyuluhan kepada petani. Namun yang paling penting dan menentukan adalah kesadaran dan pengertian dari para petani sendiri untuk melaksanakan gerakan intensifikasi pertanian melalui Inmas dan Bimas sesuai dengan bimbingan dan petunjuk-petunjuk tenaga-tenaga penyuluh yang trampil. Demikian juga sangat penting peranan BUUD/ KUD, yang bertambah kemampuannya dalam menjadi wadah pengembangan bersama dan melayani kebutuhan kaum tani dalam usaha meningkatkan

produksi maupun dalam meningkatkan kesejahteraan petani pada umumnya.

Usaha-usaha intensifikasi pertanian yang sekarang menunjukkan hasilnya yang melonjak itu, sejak musim tanam 1979 kita tingkatkan lagi dengan melaksanakan Intensifikasi Khusus, ialah intensifikasi yang dilakukan oleh para petani secara berkelompok dalam satu hamparan. Hasil Intensifikasi Khusus ini sangat memberi harapan, karena ternyata dengan Intensifikasi Khusus ini, dengan bekerja secara berkelompok dengan pembagian tugas yang teratur dan tertib di antara petani dalam kelompok, telah dapat meningkatkan hasil produksi beras yang cukup besar setiap hektar.

Oleh karenanya Pemerintah terus mendorong agar para petani secara berkelompok makin banyak dapat mengikuti Intensifikasi Khusus, yang memang terbukti sangat menguntungkan itu.

Sungguh besar peluang kita untuk menaikkan produksi beras dan sekaligus merupakan perbaikan kehidupan petani di masa depan. Intensifikasi Khusus menunjukkan bahwa semangat gotong royong memang dapat kita terapkan dalam kehidupan pertanian yang makin bertambah maju. Demikianlah harapan kita di masa datang dalam meningkatkan produksi beras sungguh bertambah cerah. Melihat hasil-hasil panen besar yang telah dan yang masih akan berlangsung dalam tahun ini, maka dapat diperkirakan —seperti saya katakan tadi— produksi beras dalam tahun '80 ini akan dapat mencapai sekitar 20 juta ton. Dan jika ini dapat pula kita tingkatkan di tahun depan, maka Insya Allah, berarti kita telah mendekati sasaran produksi beras pada tahun terakhir REPELITA III dan tercapainya swasembada pangan yang kita idam-idamkan bersama bukannya suatu kemustahilan.

Walaupun harapan-harapan kita cukup cerah, namun kita tidak boleh lengah, apalagi takabur. Kita harus tetap waspada dan siaga terhadap kemungkinan cuaca yang kurang menguntungkan,

terhadap timbulnya hama jenis baru atau meledaknya hama tikus yang masih sulit mengatasinya.

Sidang Dewan yang terhormat;

Usaha meningkatkan produksi pangan juga akan kita perluas dengan pencetakan sawah baru di daerah-daerah yang telah terjamin pengairannya, sekaligus untuk memanfaatkan sarana pengairan yang telah kita bangun dengan pembiayaan yang cukup besar dan untuk menimbulkan tambahan lapangan kerja.

Karena pencetakan sawah baru itu ditujukan untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani penggarap, maka harus diusahakan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tidak memberatkan petani. Jika pemilik tanah yang akan dijadikan sawah itu enggan melakukannya atau terhadap tanah yang tidak jelas pemilikinya, maka Pemerintah akan menguasai tanah seperti itu dan akan menyerahkan kepada petani penggarap dengan cara bagi hasil, tanpa merubah status pemilikan tanah tersebut.

Usaha intensifikasi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan penghasilan petani tidak saja terbatas pada pertanian tanaman pangan, tetapi juga diperluas pada perkebunan, peternakan dan perikanan. Di bidang perkebunan dewasa ini sedang disiapkan program-program rehabilitasi dan peremajaan perkebunan rakyat yang dimiliki oleh para petani perkebunan, seperti perkebunan karet, kopi, kelapa dan lain-lain. Demikian juga di bidang peternakan dan perikanan akan ditingkatkan paket-paket bimas ternak sapi potong, sapi perah dan unggas serta paket bimas udang/ikan tambak dan air payau.

Di samping usaha meningkatkan intensifikasi pertanian, kita juga berusaha meningkatkan produksi pertanian dengan melakukan ekstensifikasi, terutama di luar Jawa. Langkah ini kita kaitkan sekaligus dengan usaha memecahkan masalah kependudukan dan

masalah memperbaiki tingkat kehidupan golongan rakyat kecil pada umumnya, ialah pelaksanaan transmigrasi. Pembukaan tanah di daerah-daerah tujuan transmigrasi kita percepat pelaksanaannya dan pelaksanaan keberangkatan transmigrasi dari daerah-daerah padat penduduk ke daerah-daerah transmigrasi juga kita tingkatkan, baik melalui darat, laut maupun udara. Hasil-hasilnya sampai sekarang cukup tampak; jumlah yang ditransmigrasikan setiap bulannya terus meningkat, sehingga untuk 7 bulan terakhir ini saja --dalam tahun 1980-- telah dipindahkan 34.000 KK, lebih dari separoh jumlah yang dipindahkan dalam REPELITA II selama lima tahun. Apabila hal ini dapat terus dilaksanakan, maka program transmigrasi dalam REPELITA III ini Insya Allah akan dapat diwujudkan. Dan ini bukan saja akan mengurangi tekanan masalah kependudukan di daerah-daerah padat penduduk, tetapi jelas akan dapat membuka dan menumbuhkan daerah-daerah produksi baru di luar Jawa serta memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat, khususnya para transmigran.

Usaha peningkatan kemampuan dan penghasilan golongan ekonomi lemah dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial, juga akan terus digalakkan dalam bidang industri kecil/kerajinan rakyat dan pengusaha kecil. Di samping kemudahan-kemudahan yang selama ini telah disediakan oleh Pemerintah seperti bimbingan dan penyuluhan, perkreditan dengan syarat-syarat ringan dan lain-lain, maka kerjasama antara industri besar dan kuat dengan industri kecil/kerajinan rakyat terus didorong dengan cara yang disebut "bapak angkat". Dewasa ini makin banyak perusahaan swasta besar dan perusahaan negara bekerjasama dengan perusahaan industri kecil/kerajinan. Perusahaan besar memberikan bimbingan teknis, penyediaan bahan baku dan lain-lain kepada industri kecil/kerajinan untuk dapat memproduksi berbagai barang yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar itu dan selanjutnya menampung dan membantu

memasarkan hasil produksi industri kecil/kerajinan tadi. Hal ini mungkin dan telah banyak dikerjakan dalam bidang suku cadang kendaraan bermotor, industri tekstil, kerajinan kulit, kerajinan kayu dan sebagainya.

Apabila cara semacam ini dapat dikembangkan terus, maka akan diperoleh manfaat ganda. Produksi dalam negeri akan terus berkembang dan merata, yang akan membuka banyak lapangan kerja. Di samping itu baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil yang bekerjasama akan memperoleh keuntungan yang mungkin meningkat. Dan yang lebih penting lagi adalah terciptanya kerjasama dalam suasana dan semangat gotong royong, saling bantu membantu antara yang kuat dengan yang lemah di bidang sosial ekonomi. Ini sungguh merupakan pengamalan dasar falsafah kita Pancasila.

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemampuan golongan pengusaha yang lemah, maka di samping kemudahan-kemudahan di bidang perkreditan yang telah banyak disediakan, perlindungan dan pengutamaan pengusaha-pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi makin dipertegas dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 14A yang telah banyak diketahui oleh masyarakat. Saya mengharapkan kepada semua pihak, para pejabat Pemerintah, Pusat dan Daerah, para pengusaha golongan ekonomi lemah dan juga KADIN untuk benar-benar mengusahakan terlaksananya ketentuan-ketentuan dan semangat Keputusan Presiden Nomor 14A tersebut.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi kita juga tampak dalam bidang industri. Dalam tahapan pembangunan dewasa ini, maka sesuai dengan GBHN, kita berusaha mengembangkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan setengah jadi. Dalam rangka inilah kita telah dan akan terus membangun pabrik-pabrik besar seperti pabrik pupuk dan semen, yang bahan

baiknya banyak terdapat di Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan Indonesia sendiri yang terus meningkat, maupun untuk ekspor. Demikian juga kita dorong dan bahkan kita wajibkan kepada para pengusaha kehutanan pemegang HPH untuk mendirikan industri-industri pengolahan kayu, seperti pabrik plywood, pulp dan mungkin kertas, sehingga kita dapat memanfaatkan kekayaan alam kita yang berupa kayu itu secara lebih besar daripada kalau kita hanya mengekspor kayu gelondongan. Karena itulah kita juga membatasi ekspor kayu gelondongan dan memberikan dorongan untuk ekspor kayu olahan.

Dalam bidang industri petrokimia kini sedang dipersiapkan pembangunan industri aromatic, olifm dan methanol dengan kejasama dengan pihak luar negeri. Sedangkan dalam bidang pengolahan minyak bumi kita sedang giat-giatnya mempersiapkan pembangunan hydrocracker di Dumai, perluasan kilang minyak di Cilacap dan Balikpapan serta perluasan kilang gas alam cair di Kalimantan Timur dan Aceh. Dalam rangka menambah kemampuan kita akan kebutuhan energi maka pembangunan beberapa pusat listrik tenaga air, tenaga panas bumi dan penambangan batu bara sedang digarap dan dilaksanakan.

Sementara itu pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik dan peleburan aluminium Asahan serta perluasan pelengkapan pabrik pengecoran besi baja di Cilegon terus dilakukan sebagai langkah-langkah permulaan untuk mendukung pembangunan industri berat dan industri dasar, seperti industri pesawat terbang, industri perkapalan, industri alat-alat berat dan otomatis dan sebagainya yang dalam tahapan-tahapan pembangunan yang akan datang harus kita miliki sendiri dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang, ialah keseimbangan struktur ekonomi, yaitu industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh.

Saudara Ketua dan Sidang yang mulia;

Pembangunan yang sangat luas dan gegap gempita itu hanya dapat kita capai apabila kita dapat mengembangkan tiga landasan Trilogi Pembangunan secara serempak : kita terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang memadai yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata dan tetap dalam suasana stabilitas nasional yang dinamis.

Dan memang, setaraf dengan kemajuan dan kemampuan kita di bidang ekonomi, maka peningkatan kesejahteraan yang merata juga terus kita laksanakan.

Kegiatan - kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan keluarga berencana, agama, kependudukan dan lingkungan hidup, perumahan dan prasarananya : listrik dan air minum, kelancaran hubungan antara daerah yang satu dengan yang lain dan lain-lain, telah dan sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan di sana-sini bahkan diusahakan percepatan pencapaian sarannya.

Untuk hanya menyebut beberapa sektor saja dalam rangka ini, kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar dalam REPELITA III ini telah dapat dilaksanakan kewajiban belajar bagi anak-anak umur sekolah antara 7 - 12 tahun. Dan selanjutnya mengusahakan penampungannya di sekolah-sekolah lanjutan dan kejuruan yang lebih tinggi, agar akhirnya mereka dapat terjun di masyarakat dengan kemampuan dan ketrampilan yang memadai. Di lingkungan pendidikan tinggi akan ditingkatkan kelengkapan peralatan penelitian/laboratoria pada semua fakultas eksakta, dalam rangka meningkatkan mutu dan memperbesar kapasitas fakultas yang bersangkutan.

Kita juga berusaha agar dalam REPELITA III ini dapat dibangun Puskesmas-puskesmas yang lebih banyak dan tersebar melampaui Ibukota Kecamatan lengkap dengan tenaga dokternya. Dan setiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya diusahakan telah

memiliki Rumah Sakit Kabupaten yang lengkap dengan dokter-dokter spesialis yang diperlukan. Juga kegiatan program keluarga berencana terus diperluas dan diintensifkan agar penurunan angka kelahiran dapat dipercepat.

Untuk meningkatkan hubungan antara daerah-daerah atau tempat-tempat yang terpencil maka di samping akan dilanjutkan pembangunan jalan-jalan poros utama seperti jalan raya di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan lain-lain, akan dipercepat penyelesaian pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan berbagai kota di Aceh Barat, Nusatenggara Barat, Nusatenggara Timur, Timor Timur dan lain-lain yang selama ini keadaannya belum memadai. Juga akan kita tingkatkan angkutan laut perintis dan angkutan udara perintis dengan menambah sejumlah armadanya dan perbaikan prasarananya, terutama untuk daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusatenggara Barat, Nusatenggara Timur, Irian Jaya dan daerah-daerah lainnya.

Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di desa-desa akan terus digalakkan usaha-usaha nyata seperti listrik masuk desa, koran masuk desa, perpustakaan masuk desa dan sebagainya, satu dan lain dalam rangka pembangunan ketahanan masyarakat pedesaan. Sedangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan-kemudahan di kota-kota besar Pemerintah akan memperbesar bantuan untuk memecahkan masalah angkutan kota, kebersihan kota dan perbaikan kampung.

Meningkatnya kesejahteraan rakyat jelas tampak pada pertumbuhan kehidupan beragama di Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari hasil-hasil pembangunan pada umumnya, termasuk pembangunan bidang agama. Dan pembangunan bidang agama ini akan terus kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Dalam hubungan ini harus terus diusahakan agar keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat juga menjadi pendorong pembangunan dan perekat persatuan.

Inilah saya kira yang menjadi tugas dan tantangan para pemimpin, termasuk khususnya para pemimpin Agama dalam mengembangkan dan membangun kehidupan keagamaan dalam masyarakat yang sedang membangun.

Apabila kita dapat menghayati makna hakiki dari Agama yang kita yakini masing-masing dengan sebaik-baiknya dan kita juga telah menghayati dasar falsafah Pancasila, maka kita —khususnya para pemimpin, termasuk pemimpin Agama— akan mampu mengendalikan diri kita masing-masing pada waktu diperlukan untuk diabdikan kepada kepentingan yang lebih besar. Kita memang perlu mengendalikan sikap dan kepentingan golongan atau pribadi kita masing-masing, termasuk kepentingan golongan sesuatu agama, apabila diperlukan untuk memelihara persatuan seluruh Bangsa kita atau untuk menghindarkan perpecahan di antara kita dalam naungan semangat dan falsafah Pancasila. Karena dalam wadah negara Indonesia yang bersatu dan berdasarkan Pancasila dijamin pengamalan dan pertumbuhan kehidupan keagamaan berdasarkan keyakinan masing-masing. Dan hanya dengan inilah kita yakin setiap agama akan dapat hidup dan berkembang dengan subur dipersada Indonesia ini.

Sungguh, masih banyak lagi usaha pembangunan yang terus akan kita kerjakan dan akan kita tingkatkan.

Apabila ini semua dapat terlaksana dalam REPELITA III ini, maka dalam memasuki REPELITA IV nanti akan tampak makin nyata jalan menuju terciptanya landasan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi sasaran jangka panjang kita setelah melaksanakan 5 — 6 kali REPELITA. Saya yakin semua tadi mungkin kita laksanakan asal raja kita pandai-pandai memanfaatkan kemampuan . ekonomi yang kita miliki sekarang, dan dapat memelihara stabilitas dan persatuan nasional serta menggelorakan semangat pembangunan dari rakyat.

Karena itu kita harus membulatkan tekad untuk melanjutkan-

kan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Jalan dan arah pembangunan yang kita tempuh sudah benar dan keadaan serta kemampuan kita sekarang cukup memberikan bekal untuk berjalan terus mencapai sasaran yang kita cita-citakan bersama.

Untuk makin mendorong maju pembangunan itu kita lanjutkan pembangunan aparatur yang kuat, bersih dan berwibawa. Selama ini kemampuan bekerja aparatur kita telah sangat meningkat, tertib administrasi pemerintahanpun bertambah baik, meskipun masih banyak yang harus kita perbaiki. Kita juga menyadari bahwa yang banyak disorot oleh masyarakat adalah kebersihan aparatur dari tindak-tindak tercela dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini saya ingin menegaskan bahwa Pemerintah tidak membiarkan korupsi, praktek-praktek tercela lainnya yang melanggar hukum; menodai nama baik aparatur atau merugikan rakyat. Pemerintah akan terus menindak setiap penyelewengan dan korupsi. Namun hendaknya kita tetap obyektif, tetap jujur dalam memberikan penilaian. Secara umum aparatur kita tetap teguh dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas-tugas rutin maupun tugas-tugas pembangunan. Sebagian terbesar pegawai dan pejabat masih melaksanakan tugas pengabdianya kepada negara dan bangsa dengan penuh ketekunan dan kejujuran. Jangan sampai kita beranggapan bahwa seluruh aparatur pemerintahan kita telah rusak sama sekali hanya karena ada noda-noda di sana-sini. Jika aparatur kita benar-benar bobrok, maka tidak mungkin kita mencapai kemajuan pembangunan seperti sekarang ini. Kepada semua pejabat dan pegawai saya ingatkan untuk tetap menyadari bahwa wenang yang ada pada kita pada dasarnya tidak lain adalah berasal dari kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dan karenanya harus kita abdikan untuk kepentingan rakyat.

Marilah kita lanjutkan pembangunan aparatur sehingga ber-

tambah bersih, bertambah mampu melaksanakan tugas-tugasnya.

Dengan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa kita akan dapat melanjutkan pembangunan yang lebih lancar, meningkatkan segala hasil kemajuan yang dapat kita capai sampai saat ini.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Sementara kita sibuk mengatur rumah tangga sendiri dan memajukan pembangunan, perhatian kita tidak boleh terlepas dari perkembangan dunia.

Memasuki dasawarsa '80-an ini kita menghadapi keadaan dunia yang serba tidak menentu, penuh dengan tantangan dan mengandung segala kemungkinan. Semuanya itu mengharuskan kita bersikap waspada, memperkuat diri 'ke dalam dan mengkokohkan ketahanan nasional.

Jika dalam dasawarsa yang lalu dunia diberi harapan dengan peredaan ketegangan antara kekuatan besar, maka akhir-akhir ini dunia kembali merasakan hangatnya perang dingin. Berbagai ketegangan dan sengketa seolah-olah tiba-tiba serentak muncul di berbagai kawasan, yang seringkali dibayangi oleh kemungkinan letusan senjata perang. Dunia terasa tidak aman. Yang paling membuat kita prihatin adalah bahwa ajang perebutan pengaruh kekuatan-kekuatan besar dunia itu bergeser ke wilayah negara-negara yang sedang membangun : di berbagai wilayah Afrika, di Timur Tengah, di Asia Barat dan di Asia Tenggara.

Di Timur Tengah terwujudnya perdamaian masih akan melewati jalan yang panjang dan rumit. Masa depan rakyat Palestina, yang merupakan kunci pokok perdamaian di sana, belum juga terselesaikan secara tuntas. Dalam masalah ini sikap kita sangat jelas dan konsisten : kita dukung hak syah rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri. Kita dukung perjuangan bangsa Arab untuk mendapatkan kembali wilayah Tanah Airnya yang diduduki Israel, termasuk Al Quds. Kita menentang secara

tegas niat Israel untuk mencaplok seluruh Yerusalem yang akan dijadikan ibu kotanya. Ini menusuk perasaan umat Islam di seluruh dunia.

Kerawanan situasi di Timur Tengah makin meningkat akibat pengaruh sengketa Iran dan Amerika Serikat sehubungan dengan penyanderaan sejumlah warga negara Amerika Serikat, yang belum juga terselesaikan sampai saat ini. Sementara itu kegawat-an baru muncul di Afganistan karena intervensi militer dari luar, kendatipun pendapat umum dunia mengutuk campur tangan seperti itu.

Sengketa baru yang lambat laun menjadi makin rumit dan dapat menggawat timbul kembali di wilayah sekitar kita. Sementara masalah Kampuchea belum juga terselesaikan, keadaan diperburuk oleh gangguan nyata-nyata, terhadap integritas wilayah Thailand. Dengan dalih apapun kita tidak dapat membenarkan gangguan negara lain terhadap kedaulatan negara dan integritas wilayahnya. Sebagai sesama negara ASEAN kita mendukung sepenuhnya hak Thailand untuk mempertahankan keutuhan wilayah negaranya. Sikap kita terhadap masalah Kampuchea sangatlah jelas, ialah penarikan mundur semua pasukan asing dari sana dan penghormatan yang sepenuh-penuhnya kepada hak rakyat Kampuchea untuk memilih pemerintahannya sendiri dan menentukan masa depan menurut kehendaknya sendiri.

Untuk kesekian kalinya Indonesia menyatakan keteguhan tekadnya, bersama-sama anggota ASEAN lainnya, untuk menciptakan wilayah Asia Tenggara sebagai daerah damai, bebas dan netral. Kepada semua negara atau kelompok negara, yang besar maupun yang kecil, kita berharap agar memahami maksud baik ASEAN. Yang kita inginkan tidak lain adalah kedamaian, kemajuan dan kesejahteraan menurut cita-cita yang kita anggap baik bagi masyarakat-masyarakat kita. Perhimpunan kita tidak kita tujukan kepada negara lain. Karena itu kita tidak menyusun

kekuatan militer untuk maksud-maksud agresi. Yang kita lakukan adalah mengadakan kerjasama antara sesama negara ASEAN di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, sehingga kita masing-masing akan mampu bertahan terhadap setiap gangguan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

Sebagai salah satu negara non blok, maka kita juga sangat prihatin bahwa sengketa-sengketa dan ketegangan-ketegangan yang timbul akhir-akhir ini di berbagai kawasan dunia telah melibatkan sejumlah negara-negara non blok. Namun ini tidak menghilangkan kepercayaan kita akan tetap pentingnya gerakan non blok. Malahan sebaliknya, ketegangan dunia yang makin terasa sekarang ini mengharuskan tampilnya kekuatan non blok untuk turut mencari jalan penyelesaiannya. Untuk itu non blok harus tetap setia kepada kemurnian semangat dan tujuannya semula, ialah tidak membiarkan dirinya disusupi oleh kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia, tetapi terus menggalang persatuan dan kesetiakawanan di antara negara-negara non blok, sehingga dapat mempunyai peranan dan arti dalam usaha menciptakan perdamaian dunia yang kokoh dan menghindarkan terjadinya peperangan yang mencemaskan.

Seperti telah disinggung di muka, keadaan ekonomi dunia dalam dasawarsa di hadapan kita kelihatan suram dan serba tidak menentu. Ekonomi dunia sedang dihinggapi berbagai penyakit sekaligus : laju pertumbuhan yang rendah, inflasi yang tinggi dan pengangguran di mana-mana. Dunia mulai sadar bahwa berbagai krisis yang menggoyahkan sendi-sendi ekonomi dan keuangan dunia bukanlah hal yang bersifat sementara, seperti yang diduga semula. Sendi-sendi itu goyah karena struktur tata ekonomi dunia yang lama berdiri di atas dasar ketidakadilan. Hal ini hendaknya menyadarkan semua negara di dunia untuk tidak menunda-nunda lagi usaha-usaha untuk terwujudnya tata ekonomi dunia baru.

Berbagai usaha sebelum ini memang telah dilakukan. Namun

hasilnya sangat lambat dan tidak mendasar. Dialog Utara-Selatan yang terkenal itu terbatas saja hasilnya. Karena itu kita terus memperjuangkan terbentuknya tata ekonomi dunia baru melalui segala forum yang dapat digunakan, baik dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di luarnya seperti melalui Kelompok-77, Gerakan Non Blok, Konferensi Islam, OPEC dan tentu saja ASEAN.

Kita ber pendapat bahwa keadilan ekonomi dunia, dan juga kemantapan ekonomi dunia, akan terwujud jika diadakan perubahan-perubahan struktural dalam hubungan ekonomi internasional. Dan langkah yang perlu dilakukan adalah pertama-tama menyusun struktur yang baru dalam perdagangan internasional di bidang komoditi, yang menyangkut barang-barang ekspor tradisional, yang umumnya berasal dari negara-negara yang sedang membangun.

Harga barang-barang ekspor tradisional itu selama ini turun naik, yang biasanya merugikan negara-negara penghasil. Padahal bagi negara-negara yang sedang membangun seperti kita ini, ekspor perlu terus dinaikkan terutama untuk mendatangkan barang modal dan bahan baku untuk memajukan industri. Setiap pukulan terhadap ekspor negara-negara yang sedang membangun sangat buruk dan luas pengaruhnya.

Karena itu kita menganggap sangat mutlak perjuangan untuk mencapai stabilitas harga di pasaran internasional dari bahan-bahan mentah kita pada tingkat yang lebih adil dan layak bagi negara-negara yang sedang membangun, yang merupakan penghasil barang-barang tadi. Untuk itulah bersama-sama negara-negara yang sedang membangun lainnya kita memperjuangkan terwujudnya Program Komoditi Terpadu. Untuk melaksanakan program tadi langkah pertama yang penting adalah pembentukan lembaga keuangan internasional baru yang bernama Dana Bersama Komoditi.

Demikianlah, setelah melalui perjuangan dalam perundingan-perundingan selama bertahun-tahun yang sulit dan berbelit-belit, maka pada akhir bulan Juni yang baru lalu tercapailah kesepakatan internasional mengenai pembentukan Dana Bersama Komoditi.

Melalui Dana Bersama inilah diharapkan akan dapat distabilkan harga bahan-bahan mentah ekspor negara-negara yang sedang membangun; dan juga dapat tersedia dana yang lebih memadai untuk riset, peningkatan produktivitas, pemasaran, diversifikasi dan sebagainya.

Pembentukan Dana Bersama Komoditi ini merupakan kemajuan dan mempunyai arti penting terutama bagi negara-negara berkembang, karena keputusan ini adalah keputusan internasional di bidang ekonomi yang pertama, yang merupakan hasil gagasan negara-negara berkembang untuk kepentingan semua negara, khususnya negara-negara berkembang penghasil bahan-bahan mentah ekspor, yang semula sulit dapat diterima oleh negara-negara maju.

Perlu kita ingat, bahwa perjuangan menstabilkan harga komoditi di pasaran internasional itu juga merupakan salah satu keputusan Konferensi Asia Afrika di Bandung lebih dari seperempat abad yang lalu. Hal ini menyadarkan kita bahwa perjuangan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dunia lebih-lebih memerlukan ketabahan dan kegigihan perjuangan yang memakan waktu panjang.

Mudah-mudahan keputusan yang penting itu merupakan sumbangan dan langkah permulaan yang penting bagi terciptanya tata ekonomi dunia baru yang kita idam-idamkan bersama.

Satu hal yang membanggakan hati kita semua adalah bahwa Indonesia dipercaya oleh barisan negara-negara yang sedang membangun sebagai juru bicara mereka. Tidak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa delegasi Indonesia yang ditugasi sebagai juru bicara dan perunding pihak negara-negara yang sedang

membangun, telah memberikan sumbangan yang penting bagi berhasilnya dialog antara Utara-Selatan dalam bidang ini. Indonesia sungguh menyambut baik hasil perundingan itu dan mengharapkan agar pelaksanaan dari kesepakatan internasional itu dapat secepatnya terwujud.

Tercapainya kata sepakat mengenai pembentukan Dana Bersama merupakan langkah yang sangat penting bagi hari depan ekonomi dunia. Namun masih banyak masalah-masalah ekonomi dunia yang masih kita hadapi dan yang belum tampak adanya tanda-tanda pemecahannya. Bahkan akhir-akhir ini justru ekonomi dunia mengalami kemunduran dalam usaha menegakkan hubungan yang wajar antara negara-negara berkembang dan negara-negara industri. Hal ini menyangkut gejala proteksionisme yang semakin meningkat di sementara negara-negara industri dengan akibat yang mencekam kegiatan ekonomi dunia. Dengan berbagai macam cara dan dalih sementara negara industri berusaha untuk menutup atau mempersempit pasarannya terhadap arus barang-barang industri yang dihasilkan dan diekspor oleh negara-negara berkembang. Kiranya para negarawan di negara-negara industri perlu menyadari bahwa tindakan-tindakan semacam itu bukan saja merupakan pukulan terhadap usaha pembangunan negara-negara yang sedang berkembang, melainkan justru merupakan salah satu sumber utama daripada kegagalan untuk memperbaiki ekonomi negara-negara industri yang kini dilanda oleh inflasi dan resesi.

Barang-barang yang dihasilkan oleh industri di negara-negara berkembang jelas lebih rendah biayanya dan karena itu lebih rendah pula harganya daripada barang-barang serupa yang dihasilkan oleh negara-negara industri. Apabila barang-barang dari negara-negara berkembang yang lebih murah harganya itu dapat masuk pasaran negara-negara industri dengan bebas maka hal tersebut bukan saja sangat membantu meringankan beban para konsumen di negara-negara industri, melainkan juga akan mem-

bantu pengendalian laju inflasi yang melanda negara-negara industri. Dalam pada itu kesempatan yang benar-benar terbuka bagi negara-negara berkembang untuk mengekspor barang-barang hasil industrinya ke pasaran negara-negara industri akan merupakan dorongan yang kuat untuk lebih mempercepat lagi pembangunan industri di negara-negara berkembang. Untuk melaksanakan industrialisasi tersebut negara-negara berkembang memerlukan alat-alat produksi berupa mesin-mesin dan berbagai macam alat-alat. Sebagian besar dari alat-alat produksi tersebut belum dapat dihasilkan sendiri oleh negara-negara berkembang dan harus diimpornya dari negara-negara industri. Dengan lebih cepatnya proses industrialisasi tersebut maka lebih besar pula kemampuan negara-negara berkembang untuk membeli alat-alat produksi dari negara-negara industri. Pembelian alat-alat produksi yang lebih banyak oleh negara-negara berkembang dari negara-negara industri akan membantu mendorong kegiatan ekonomi di negara-negara industri dan mengurangi gejala kelesuan ekonomi atau resesi yang kini sedang mencekam negara-negara industri. Jadi, dengan membuka pasarannya bagi barang-barang yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang maka negara-negara industri akan membantu dirinya sendiri pula, karena hal tersebut akan membantu pengendalian laju inflasi dan membantu mengurangi resesi di negara-negara industri.

Dengan demikian jelaslah bahwa bilamana negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan gigih memperjuangkan terbentuknya Dana Bersama untuk bahan mentah atau komoditi dan dengan tiada hentinya terus menerus memperjuangkan terbukanya pasaran di negara-negara industri untuk hasil produksi negara-negara berkembang, maka hal itu bukanlah untuk kepentingan pembangunan negara-negara berkembang saja melainkan juga merupakan suatu bantuan terhadap usaha negara-negara industri untuk mengatasi inflasi dan resesi yang sedang mereka

alami. Sungguh, hubungan Utara-Selatan bukanlah masalah amal, bukanlah masalah yang satu adalah pemberi dan yang lain adalah penerima. Hubungan Utara-Selatan, pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru, adalah masalah interdependensi, masalah hubungan yang kait mengkait antara kepentingan semua bangsa di dunia, masalah hari depan umat manusia, masalah hari depan anak cucu bangsa-bangsa yang sedang membangun dan masalah hari depan anak cucu bangsa-bangsa yang kini sudah menikmati tingkat hidup yang jauh lebih tinggi.

Kini dalam rangka Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang dipersiapkan serangkaian perundingan-perundingan yang meliputi berbagai segi masalah Utara-Selatan dan yang lebih dikenal dengan sebutan "Negosiasi Global". Rangkaian perundingan-perundingan ini, yang dimulai pada waktu kita memasuki dasawarsa 80-an, diliputi oleh suasana ekonomi dunia yang jauh daripada cerah. Namun perlu kita ingat bahwa "Negosiasi Global" tersebut justru merupakan rangkaian langkah-langkah untuk menata kembali ekonomi dunia, untuk meletakkan landasan-landasan baru yang lebih kokoh, yang lebih adil –dan karena itu juga lebih langgeng– bagi hubungan ekonomi dunia untuk hari depan semua bangsa. Karena itu pada kesempatan ini ingin saya mengajak para pemimpin dari semua negara di dunia, para negarawan yang telah memperoleh kepercayaan dari bangsa masing-masing untuk memimpin negaranya, untuk berusaha dengan sepenuhnya agar rangkaian "Negosiasi Global" dalam rangka PBB benar-benar dapat segera dimulai, berlangsung dengan lancar dan menghasilkan langkah-langkah yang sungguh-sungguh merupakan cakrawala baru dalam hubungan ekonomi antara bangsa.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Demikianlah saya telah mengajak kita semua untuk melihat sejarah kita di belakang dan meneliti keadaan kita di masa seka-

rang. Saya juga mengajak kita melihat tantangan dan harapan-harapan kita di masa datang, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Menilai keadaan suatu bangsa haruslah dalam kerangka perspektifnya sejarah. Baik atau buruknya keadaan, maju atau mundurnya pembangunan, selalu harus dilihat dalam kerangka perbandingan masa lampau dan masa sekarang. Juga kemungkinan-kemungkinannya di masa datang. Apakah keadaan kita sekarang lebih baik dari kemarin, dan apakah kita mempunyai harapan akan keadaan yang lebih baik lagi di han esok.

Dan kita dapat mengatakan bahwa keadaan kita sekarang memang telah lebih baik dari kemarin. Dan kita mempunyai kepercayaan dan kesempatan yang amat baik untuk mencapai keadaan hari esok yang lebih baik lagi.

Jika dasawarsa 70-an merupakan dasawarsa permulaan pembangunan, marilah kita jadikan dasawarsa 80-an ini sebagai dasawarsa pematapan pembangunan.

Kita telah bergulat untuk mengatasi berbagai tantangan dan kita telah bekerja keras hingga ekonomi kita makin memiliki daya tahan dan kekuatan untuk tumbuh lebih subur. Namun, jika demokrasi ekonomi belum terwujud sekarang, tidaklah berarti bahwa kita melalaikan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Kita memang belum sampai di sana, tetapi sekarang kita sedang bergerak ke sana.

Kita telah berusaha untuk hidup tertib secara konstitusional dan kita telah bersama-sama memelihara demokrasi. Namun, jika kita merasa belum puas dengan demokrasi politik kita sekarang, ini tidaklah berarti bahwa di Indonesia tidak ada demokrasi. Sebaliknya demokrasi sedang tumbuh berlandaskan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan segala kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam pelaksanaannya.

Dengan kesadaran dan kemauan demikian, dengan memperkuat persatuan dan berpegang teguh pada semangat kekeluargaan satu bangsa yang besar dengan sepenuh-penuh kesetiaan kita kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45, pasti kita akan makin dekat kepada cita-cita Kemerdekaan kita : ialah kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Marilah kita lanjutkan perjuangan melaksanakan pembangunan yang selama ini telah kita lakukan dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan lahir dan ketabahan batin kepada kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 1980.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O